

BAB IV. MODEL POLITIK PERDAMAIAN UNTUK REKONSTRUKSI IDENTITAS SOSIAL DAN NASIONALISME MASYARAKAT PASCA KONFLIK DI BOYOLALI MELALUI RANAH PENDIDIKAN

Ba'in¹, Totok Rochana²

¹Program Studi Ilmu Sejarah

**²Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang**

¹bain@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.1529/kp.v1i1.37>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model politik perdamaian untuk rekonstruksi identitas sosial dan nasionalisme pada masyarakat pasca konflik di Boyolali melalui pendidikan.. Penelitian ini dikerjakan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara investigatif pada saksi sejarah, pelaku sejarah, dan elemen pendidikan di Boyolali. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa di tahun 1965 telah berdampak pada trauma dan menimbulkan prasangka dan dendam yang tidak berujung. Untuk itu dibutuhkan sebuah jalan alternatif untuk mencapai penyatuan pihak-pihak berkonflik ataupun generasi sesudahnya yang terkena imbas dari konflik tersebut. Model politik perdamaian yang digagas cukup konstruktif dan dapat diapresiasi sebagai suatu jalan baru dalam mengembangkan harmonisasi sosial masyarakat melalui kegiatan belajar yang kreatif dengan memanfaatkan media dan model pembelajaran inovatif. Model ini sangat kompatibel bagi pendidikan masyarakat pasca konflik untuk membina masyarakat yang memahami nilai kemanusiaan dan melaksanakan Pancasila dalam praktik. Untuk itu model politik perdamaian ini sangat penting untuk direkomendasikan bagi dunia pendidikan.

Kata Kunci: model, politik perdamaian, ranah pendidikan.

PENDAHULUAN

Konflik selalu melahirkan pembelahan di masyarakat (Abdullah, Abdurrachman, & Gunawan, 2012), antara kelompok yang kalah, kemudian terhina, dan kelompok yang menang kemudian dengan leluasan menciptakan narasi yang menjustifikasi dirinya sebagai pemegang kebenaran tunggal. Gejolak politik di Indonesia tahun 1960an telah memperlihatkan bahwa konflik sosial yang diakibatkan oleh pertentangan ideologi dapat menjadikan masyarakat mengalami penderitaan, pada waktu itu, pasca Gerakan 30 September 1965 atau G30S (Luhulima, 2006), rakyat mengalami kebingungan dan dilema antara membunuh atau dibunuh, *killing or to be killed* (Said, 2013). Di Boyolali konflik itu masih membekas hingga saat ini, belum ada upaya penyembuhan trauma masyarakat akibat konflik sosial tersebut.

Tidak hanya sampai di situ, konflik di Boyolali di masa-masa berikutnya terus berlanjut seperti dapat ditemukan dalam kajian Sanit (2000), Fauziyyah (2015), Imroaturrosidah (2015), Pertiwi (2018), semua kajian yang disebutkan membahas secara historis dan sosiologis konflik sosial di Boyolali yang hingga kini hal tersebut masih bisa mencuat dengan dalih persoalan ideologi politik maupun agama (Fauziyyah, 2015; Imroaturrosidah, 2015; Pertiwi, 2018; Sanit, 2000). Terakhir terjadi di Pemilihan Umum 2014 dan berlanjut di Pemilihan Umum 2019, pertentangan sosial yang dilandasi oleh ideologi dan agama masih menjadi dasar masyarakat dalam mewariskan dan meregenerasi kekerasan dengan alasan politik.

Hal ini mengindikasikan, bahwa kelompok-kelompok basis dari keduanya masih memelihara ide kekerasan yang sewaktu-waktu dapat mereka gunakan untuk menyerang kelompok yang berlainan dengan mereka. Hal ini menjadikan wilayah Boyolali adalah salah satu wilayah dengan frekuensi konflik yang cukup tinggi. Dan upaya pembinaan masyarakat pasca konflik sepanjang

studi literatur yang dilakukan belum ditemukan model yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.

Politik perdamaian merupakan sebuah metode yang digunakan oleh negara-negara yang baru saja terlepas dari konflik. Metode ini pernah digunakan oleh Nelson Mandela untuk menyatukan kembali masyarakat Afrika Selatan yang berkonflik dalam payung kebijakan Apartheid (Mandela, 2008). Mandela, sebagai pencetus kebijakan itu dinilai berhasil oleh masyarakat dunia. Politik perdamaian tidak hanya melepaskan masyarakat Afrika Selatan dari rasisme dan kekerasan budaya lainnya, tetapi strategi ini dapat membangun kembali (rekonstruksi) identitas masyarakat Afrika Selatan dan semangat cinta tanah air yang sempat redam selama Apartheid berlaku di sana.

Politik perdamaian juga pernah diterapkan di Jerman pasca Perang Dunia II. Waktu itu Jerman dikucilkan dalam pergaulan internasional terutama di Barat, pemerintah Jerman di tahun 1970 mulai menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan, oleh sebab itu mereka melakukan politik perdamaian dalam rangka membentuk kembali identitas sosial masyarakat Jerman dan semangat kebangsaan yang mereka miliki (Boden, 2008). Oleh sebab itu, di tahun 1990an masyarakat dunia mengenal Jerman sebagai negara yang maju dan terbebas dari belenggu konflik yang pernah terjadi di masa lalu.

Di Indonesia dalam catatan Anderson (2006) konflik sosial selalu dibiarkan begitu saja dan tidak diselesaikan secara tuntas, oleh sebab itu masyarakat Indonesia dalam pandangan peneliti sosial dunia adalah masyarakat yang terlihat damai tetapi sebenarnya mengalami psikologi rawan konflik (B. Anderson, 2006). Hal ini secara faktual dapat dibuktikan dalam konteks Boyolali. Boyolali adalah masyarakat yang belum terlepas dari belenggu psikologi konflik yang secara terus menerus diproduksi secara kultural sehingga mereka bermetamorfosa menjadi masyarakat yang rawan konflik.

Penjelasan di atas mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang model politik perdamaian untuk rekonstruksi

identitas sosial dan nasionalisme masyarakat pasca konflik di Boyolal. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana model politik perdamaian untuk rekonstruksi identitas sosial dan nasionalisme masyarakat pasca konflik di Boyolali melalui pendidikan? Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada penguatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat Boyolali untuk lebih mengutamakan integrasi daripada pewarisan dendam dan kebencian berdasarkan narasi sejarah yang telah berlalu.

OPERASI PEMBERSIHAN SIMPATISAN KOMUNIS

Setidaknya ada dua pembersihan PKI di Boyolali antara tahun 1965 dan 1968. Yang pertama terjadi pada tahun 1965-1966, dan penduduk setempat menyebutnya sebagai Operasi Kalong. Gelar ini tampaknya bukan sebutan resmi untuk Suharto atau tentara, melainkan nama yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk penampilan dan pakaian para perwira, mengacu pada penampilan Kalong (kelelawar). Maryono, seorang petani yang tinggal di Banyudono, Boyolali, menjelaskan: "Normal bagi kelelawar adalah memakai dasi, kemeja hitam, sarung, kemeja gelap, dan umumnya menutupi wajah Anda, bukan hanya mulut Anda." (Wawancara pribadi dengan Maryono, 13 Mei 2020).

Dalam kampanye dan aksi para Kalong ini, sebagian besar pelakunya adalah warga sipil, terutama Ansor atau Banser (Barisan Ansor Serba Guna). Bagi Warso yang saat itu tinggal di Boyolali, mereka tidak membawa arit ke jalan, hampir semuanya membawa batang rotan dengan panjang sekitar 60 hingga 80 cm dan diameter sekitar 2 cm. Diketahui bahwa pohon rotan telah "diisi" dengan kekuatan yang bisa melumpuhkan korbannya. Saat di lokasi pembantaian, menurut seorang teman yang ditugaskan di Boyolali bagian selatan, mereka membawa pedang dan sangat piawai mengiris leher korban. Hal ini berbeda dengan Operasi Tritura yang dilancarkan pada tahun 1968 sebagai tanggapan atas perjuangan bersenjata PKI di selatan Boyolali, di mana aktor utama di lapangan adalah militer. Pariyah mengenang pengalaman itu

dengan getir dan membandingkan domba pelaku Operasi Kalong dengan Operasi Tritura.

“Di Boyolali itu ada dua operasi. Yang pertama itu Operasi Kalong, tahun 1965. Yang kedua, Operasi Tritura tahun 1968. Kalau yang Tritura itu militer, kalau Kalong itu Ansor pelakunya. Pada 1965, Ansor aktif lho, sebagai penjagal, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar, menjagal orang yang tidak dikenal. Terkadang minta nasi di situ juga tega. Lha saudaraku yang Ansor juga banyak, kelompok pondok pesantren itu tokohnya adik-adikku.” (Wawancara pribadi dengan Pariyah, 16 Mei 2020).

Bukan hanya Banser atau Ansor yang melakukan pengejaran dan pembantaian. Demikian juga, bukan hanya PKI yang diburu dan dibunuh. PNI saat itu terbagi menjadi dua, yaitu PNI yang dipimpin oleh Osa Maliki Usep Ranuwihardja (OsaUsep) yang condong ke kanan dan PNI yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo - Surachman (Asu), yang condong ke kiri, juga ikut serta dalam kekacauan (Herlambang, 2013; Notosusanto & Saleh, 1989; Putra, 2012). PNI Osa-Usep ikut mengejar dan membunuh anggota PKI serta organisasi afliasinya, seperti Gerwani dan Barisan Tani Indonesia (BTI) (Roosa, 2008). Sebaliknya, orang-orang PNI yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo - Surachman ikut dikejar-kejar dan ditangkap.

“Saat baru meletus, Ansor itu yang mengejar-ngejar PKI, lalu PNI ikut-ikut. Padahal ya banyak PNI yang ditangkap. PNI kan pecah dua, selamanya kan PNI itu pecah-pecah terus. Seperti pada 1990an ya, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dua, ya to, PDI Megawati, PDI BH (Budi Hardjono), Soerjadi sama Megawati. Lalu PNI dulu Osa-Usep sama Asu.” (Wawancara pribadi dengan Pariyah, 16 Mei 2020)

Operasi kedua yang disebutkan di atas adalah Operasi Tritura tahun 1968, yang dilakukan di Boyolali selatan sebagai tanggapan atas perjuangan bersenjata PKI. Sementara itu, PKI melancarkan perjuangan bersenjata sebagai upaya untuk

melindungi diri dari Suharto dan pembersihan tentara daripada serangan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, para penyintas penganiayaan 1965-1966, tidak hanya Boyolali, tetapi juga bagian lain Jawa, termasuk Jakarta, meninggalkan daerah mereka dan berkonsentrasi di Boyolali selatan pada tahun 1966. - 1967 mengungsi bersama sambil membangun perlawanan. Hal itu terungkap dari penuturan Muiyato, anggota Himpunan Ilmuwan Indonesia (HSI), yang menjabat Wakil Direktur Jenderal Pertambangan saat Aris Munanto menjabat Menteri Pertambangan. Ia ditangkap dan dikirim ke Lapas Salemba, Jakarta, pada November 1965, namun kemudian dibebaskan pada April 1966. Setelah dibebaskan dari penjara, ia bekerja sebagai tukang listrik. Suatu ketika, ia membaca di surat kabar Indonesia Suluh bahwa Surahman Salim, Ir. Dwijati, dan Dr. Subeno dikontrol secara ketat dan bahkan dimatikan jika perlu. Dia khawatir dan akhirnya memutuskan untuk bertarung dari selatan Boyolali.

Daerah Boyolali Selatan dipilih bukan hanya karena merupakan basis merah tetapi dalam pemilihan yang menerima lebih dari 80% suara yang diberikan oleh PKI di daerah itu, tetapi juga karena alasan geografis, itu adalah daerah yang sulit untuk diakses. Daerah ini juga direkomendasikan oleh Java CDB (Grand Comité Régional). Ketika Operasi Tritura dilancarkan, sebenarnya PKI belum sampai pada tahap perjuangan bersenjata, hanya pada tahap persiapan dan pembangunan pangkalan. Namun, sebagai akibat dari tindakan pendisiplinan, sebagian karena keinginan untuk membalaskan dendam anggota yang berada di luar aturan Komite Proyek Pokok PKI atau Kompro PKI, militer mengendus persiapan perjuangan bersenjata ini. Operasi Tritura sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari setidaknya dua operasi sebelumnya yang gagal. Awalnya, "Operasi Boyolali Selatan" diluncurkan, dengan partisipasi RPKAD. Namun, operasi ini sulit dilakukan karena daerah pegunungan Boyolali Selatan dan banyak hutan liar. Setelah itu, "Operasi Intelijen Tempur" diluncurkan oleh RPKAD. Namun setelah dilakukan penilaian, kegiatan ini juga

dinilai belum mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah dua kali gagal, Operasi Tritura diluncurkan.

Operasi Tritura melibatkan pengerahan kekuatan militer yang besar. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan partisipasi unit sipil. Banser, misalnya, ikut dalam operasi ini, tetapi menyamar sebagai hansip untuk memenuhi isi Perintah Operasi 2/5/1968 yang mengizinkan penggunaan bantuan hansip/wanra Boyolali Selatan. Ahmad, mantan Komandan Banser Banyudono Cabang Boyolali, mengatakan, sebenarnya agen Banser diperintahkan ikut Operasi Tritura, tapi berpakaian satpam. Dalam urutan penerimaannya, ditetapkan bahwa setiap desa di Kabupaten Boyolali harus membagikan sepuluh orang Banser. Saat itu ia sendiri menjadi komandan tim Hansip, yang anggota operasinya adalah Mabud, Karyono, Muh. Samsuri, Syamhadi, Trimo, Romi (Wawancara pribadi dengan Ahmad, 18 Mei 2020).

Adanya keterlibatan sipil dalam pembersihan Boyolali, khususnya pada saat operasi Kalong, dapat menimbulkan hipotesis bahwa itu adalah konflik horizontal spontan antara PKI atau kelompok komunis dan bukan komunis. Setelah diperiksa lebih dekat, asumsi ini ternyata salah. Meskipun sebelumnya pernah terjadi persaingan antara kelompok komunis dan non-komunis, seperti disebutkan di atas, di Boyolali persaingan ini tidak pernah menimbulkan konflik yang serius dan menimbulkan korban jiwa. Persaingan antar kelompok politik sipil yang berbeda telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia hingga saat ini. Tanpa upaya yang disengaja dan sistematis untuk mengagitasi dan memobilisasi massa, hampir tidak mungkin untuk membawa perubahan radikal dalam iklim persaingan politik dari yang semula biasa-biasa saja menjadi persaingan politik, tindakan pembantaian dan pembunuhan yang barbar. Dalam peristiwa 1965, militer jelas memanfaatkan persaingan ini dan mengubahnya menjadi pembantaian PKI. Khusus untuk Banser, mereka bekerjasama dengan AD sebelum G30S. Di Banyuwangi, Banser diorganisir sebagai Organisasi Pertahanan Rakyat (PRO) oleh Komandan Korem Banyuwangi, Kolonel Sumadi, dan mendapat pelatihan

militer dari Resimen Komando Angkatan Darat (RPKAD)(Putra, 2012).

Asmuni, salah satu pelaku di wilayah Boyolali, mengambil alih komando tentara. Dia mengatakan timnya sekarang menerima perintah dari militer untuk mengidentifikasi, memburu, dan membunuh Komunis. Menurut pengakuannya, dia membanggakan dirinya karena telah menyelamatkan bangsa dari kekuasaan Komunis dan membantu mengubah simpatisan Komunis menjadi Muslim yang baik. "Kami menggunakan peralatan pertanian, belati, dan pentungan untuk membunuh para tahanan." (Wawancara pribadi dengan Asmuni, 19 Mei 2020).

INGATAN 1965 PASCA REFORMASI

Pasca jatuhnya Suharto, unsur-unsur Orde Baru tidak lagi utuh dan dominan seperti dulu. Kekuatan politik lain juga muncul dan membentuk kelompok politik baru (Suwirta, 2000). Ada sejumlah regulasi yang mempengaruhi dinamika sosial politik pasca Orde Baru, terutama untuk menggulingkan pemerintahan otokratis yang telah berlangsung selama 32 tahun (Kurniawan, Wanto, & Sutimin, 2019). Upaya tersebut antara lain pencabutan undang-undang antisubversi, pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Stabilisasi Nasional, pembubaran Kementerian Penerangan, dan penghentian pemutaran tahunan film Pengkhianatan G30S. /PKI. (Said, 2018). Seiring dengan perubahan tatanan tersebut, kisah-kisah alternatif peristiwa 1965 yang selama ini diredam hingga kini semakin leluasa diakses dan dilihat oleh publik. Pada April 1999, ekstrapolator mendirikan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) dengan tujuan menemukan kebenaran dan menghapus nama mereka dari stigma. YPKP 65 telah melakukan penelitian di berbagai bidang terkait pembantaian dan kuburannya, kewajiban pemenjaraan dan kesaksian para penyintas. YPKP 65 adalah salah satu kekuatan populer pertama yang menantang wacana resmi pemerintah dengan menceritakan peristiwa 1965 dari perspektif elit politik.

Internet dan media baru berperan besar dalam pembentukan memori tak tertandingi peristiwa 1965. Di era Orde Baru, proses pembentukan memori kolektif sebagai budaya ditentukan sepenuhnya oleh kelompok elit. Negara adalah "pembaca" memori, dan publik hanyalah "pembaca" cerita. (Nora, 1989). Ini dimungkinkan oleh kontrol negara atas produksi artefak budaya. Di masa Orde Baru, negara memiliki kekuasaan untuk mendirikan museum dan monumen, mendanai film berbiaya besar, mengontrol produksi dan distribusi media, dan menentukan kurikulum, pengajaran di sekolah. Alat-alat ini tidak dapat berfungsi, atau setidaknya tidak efektif, di ruang terisolasi yang diciptakan oleh kendaraan baru (Abdullah, 1994). Dalam perkembangannya, teknologi komunikasi baru menciptakan budaya interaksi yang lebih demokratis. Produksi pidato tidak lagi terfokus pada media atau organisasi pemerintah, tetapi dibahas oleh simpul komunitas online yang tidak harus saling berinteraksi di dunia offline. Jejaring sosial tidak hanya terbuka untuk semua orang dalam hal aksesibilitas, tetapi juga dalam hal tawar-menawar (Lim, 2017). Cerita yang mendominasi dapat ditantang dan alternatif dapat dikembangkan.

Seperti yang diamati oleh para peneliti, memori menjadi bumerang terutama melalui decoding memori dominan. Itu terjadi setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu, mengungkap misteri dengan studi perguruan tinggi, memparodikan cerita resmi dalam bentuk meme, dan menghadirkan cerita alternatif. Juga, saya menemukan bahwa fokusnya adalah pada peristiwa tertentu yang tidak muncul dalam ingatan arus utama, yaitu pembunuhan massal. Memori yang dominan mengabaikan, jika tidak menyangkal, fakta ini. Mengakui pembantaian dan mengakui bahwa mereka yang terbunuh adalah saudara kandung akan mengikis klaim moral dari ingatan arus utama sebagai korban dan merusak alasan untuk menindas pihak lain.

Penggunaan media baru juga berarti bahwa transfer memori terjadi di antara pengguna media, kebanyakan anak muda. (Luo, Zhang, & Duan, 2013). Akibatnya, budaya Internet juga

berperan dalam cara membahas Peringatan. Akun Remember65 dapat menjadi teropong untuk melihat ini. Akun adalah inisiatif populer untuk mengumpulkan kenangan kolektif melalui cerita pengalaman pribadi selama periode (atau wacana periode) 1965 (Adam, 2018). Remember65 menggunakan berbagai platform, termasuk Media (sebagai platform utama untuk bercerita), Facebook, Twitter, dan Youtube (tiga terakhir adalah untuk iklan, kampanye, dan keterlibatan atau interaksi sehari-hari). Dengan slogan "Kisah Anda, kisah Anda, kisah kita di usia 65", Remember65 ingin mengajak generasi pasca-1965 untuk berbagi cerita. Karena tidak menyaksikan peristiwa 30 September, kaum muda dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman mereka tentang peristiwa, misalnya dengan mengklaim "menolak warisan, warisan trauma, dan dogma". Pernyataan ini membahas warisan trauma yang diderita anggota yang setuju atau dituduh Komunis, atau warisan dogma dan propaganda Orde Baru tentang PKI.

MENYAMBUT WACANA REKONSILIASI

Berdasarkan kajian literatur yang ada, setidaknya ada lima skenario peristiwa yang dikemukakan oleh negara, peneliti, dan media nasional dan internasional untuk menjelaskan kekerasan politik 1965 yang terjadi (Adam & Anwar, 2005; B. R. O. Anderson, 2001). Pertanyaan yang sedikit banyak ingin kami temukan jawabannya antara lain: apa motif di balik kekerasan itu; siapa otaknya dan apa penyebabnya; dan siapa dan berapa banyak korban yang jatuh. Akun pertama ditulis oleh sejarawan Ismail Saleh dan Nugroho Notosusanto, yang juga menjadi versi pemerintah dari akun ini. Akun ini mencoba mengatakan bahwa pembunuhan jenderal ini sepenuhnya direncanakan dan dilakukan oleh PKI dan simpatisan (Notosusanto & Saleh, 1989). Pembunuhan-pembunuhan berikutnya merupakan upaya negara untuk mengamankan kedaulatan kelompok PKI yang berbahaya itu. Kedua, plot kudeta adalah hasil dari permusuhan di dalam militer. Ketiga, Jenderal Suharto adalah orang di balik kudeta, yang

setidaknya mempengaruhi atau memanipulasi pembunuhan jenderal ini untuk keuntungannya. Keempat, Presiden Sukarno memberi wewenang atau mendorong kelompok-kelompok yang ingin memimpin revolusi melawan negara. Kelima, adanya operasi intelijen asing juga turut andil dalam kerusuhan politik tahun 1965. Selain kelima pendapat tersebut, ada beberapa pendapat lain yang mencoba menggabungkan kelima skenario di atas. Pandangan berbeda diambil oleh Anderson dan McVey, yang menyatakan bahwa peristiwa malam 1 Oktober 1965 merupakan fenomena yang terpisah dari pembantaian yang terjadi setelahnya. Menurut Anderson, terlepas dari dalang pembunuhan jenderal dan motif di baliknya, pembantaian ratusan ribu orang Indonesia merupakan kejahatan genosida yang tidak pernah bisa dibenarkan oleh siapa pun, apa alasannya. Meski begitu, pembantaian yang terjadi setelah peristiwa 30 September 1965 tidak secara hukum ditafsirkan sebagai genosida (B. Anderson & McVey, 2009). Pertama, sampai saat ini tidak ada bukti kuat bahwa kekerasan tersebut disponsori oleh negara. Kekerasan yang terjadi bahkan digambarkan sebagai bentuk respon spontan masyarakat terhadap Komunis yang membunuh para jenderal. Kedua, pembantaian yang dilakukan di Indonesia tidak memenuhi definisi subjek genosida, dimana dalam sistem hukum nasional dan internasional subjek genosida didefinisikan sebagai sekelompok orang berdasarkan suku, ras, kewarganegaraan, dan agama. Sedangkan pembantaian yang terjadi di Indonesia semuanya berdasarkan alasan politik, bukan etnis, ras atau kewarganegaraan.

Minimnya proses hukum dan minimnya narasi alternatif membuat narasi buatan pemerintah semakin dominan. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Penerangan, terus menerus mengulang cerita melalui lembaga formal seperti program pendidikan atau melalui simbol seperti museum, monumen atau slogan di website.media. Salah satu yang paling menonjol adalah propaganda melalui film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang akan ditayangkan di semua saluran TV dan bioskop pada tanggal 30 September setiap tahun wajib

untuk semua siswa, siswa sekolah dasar saat itu harus menonton. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Nasional (PPFN), di mana kontrol naratif akan dibangun tidak hanya pada film ini, tetapi juga penyensoran film lain. Film dibuka dengan adegan di mana sebuah sekolah Islam diserang oleh sekelompok pria bersenjata dalam upaya untuk mempertajam konflik antara kelompok agama dan kelompok komunis yang digambarkan sebagai ateis barbar. Selanjutnya, pimpinan PKI digambarkan berencana membunuh para jenderal dengan asap rokok memenuhi ruangan seperti gangster. Film ini terlihat semakin intens ketika ada adegan dimana putri DI Panjaitan membasuh wajahnya dengan darah ayahnya untuk menggambarkan kekejaman PKI yang membunuh para jenderal. Cara penggambaran setiap adegan yang menitikberatkan pada kebrutalan dan kebrutalan PKI dalam membunuh para jenderal menjadi bukti bahwa film ini sengaja menggiring penonton untuk berargumen bahwa PKI itu jahat dan pantas untuk digagalkan. Kisah Kekejaman yang dipotret oleh sutradara Arifin C. Noer berdasarkan buku karya dua perwira militer, Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh, kemudian berkembang menjadi narasi dominan yang dijadikan tolok ukur sejarah Indonesia saat ini dan masih dianggap benar oleh banyak orang Indonesia hingga saat ini. Cara film ini memposisikan PKI sebagai bentuk ateisme, pengkhianatan, dan barbarisme tidak memberikan kesempatan kepada penonton untuk memikirkan kemungkinan lain terkait pembantaian berikutnya terhadap mereka yang diduga terlibat.

Setelah kekuasaan militer Suharto berakhir, kisah tragedi 1965 terus berkembang. Munculnya ilmuwan sosial baru, yang bukan dari generasi Perang Dingin, memungkinkan munculnya kisah-kisah alternatif yang lebih penting (McGregor, 2013). Kisah ini muncul terutama setelah Orde Baru digulingkan, dan para penyintas mulai berani menceritakan pengalamannya tanpa takut dipenjara. Sekitar waktu ini, sejarah resmi pemerintah banyak dibahas dan dipertanyakan. Musisi Yogyakarta menyindir pemutaran film Zaman Orde Baru dalam lagu Bioskop, Pisau Lipat,

yang salah satu liriknya berbunyi; "Kami memakai bendera seperti seragam, karena kami dibawa ke bioskop pada jam sembilan." Seperti halnya kelanjutan lirik lagu ini, melalui sebuah pertunjukan penguasa dapat menciptakan citra seorang hantu yang dikenal dengan komunisme, "Kursi bioskop penuh kutu, naik dari bangku ke dalam saku, lalu menyelundupkannya ke dalam buku, kemudian bergoyang menjadi hantu." Marianna Liz mengidentifikasi inisiatif artistik yang menghadirkan cerita alternatif, termasuk seniman sayap kiri yang baru saja dibebaskan dari pengasingan. Salah satunya adalah karya Dalang Ki Tristuti Rachmadi, mantan anggota Lekra, ditahan pada 1965 dan baru dibebaskan pada 1979. Pada 1998, Rachmadi menerbitkan sebuah buku yang menceritakan pengalamannya sebagai Tapol (Tahanan Politik). Barbara Hatley (2009) mengatakan bahwa karya Rachmadi mengawali diskusi antara anak muda yang lahir di era Orde Baru dan mulai mengungkap kebenaran di balik kejadian tersebut (Hatley, 2008). Cerita-cerita alternatif ini cenderung dipopulerkan secara lokal dan oleh industri, misalnya, hanya menjangkau pembaca/pemirsa yang lebih muda. Salah satu penyebabnya adalah kelompok antikomunis sering dianiaya dalam diskusi, pemutaran film, dan pameran yang berkaitan dengan kekerasan politik tahun 1965.

Jatuhnya Suharto pada Mei 1998 membuka peluang rekonsiliasi nasional dengan para korban tragedi nasional 1965-1966. Namun, ketika Gus Dur mengambil kesempatan ini untuk memprakarsai gagasan penghapusan perangkat hukum yang melarang PKI dan Komunisme sebagai langkah menuju rekonsiliasi, ia dihadapkan pada tantangan serius dari organisasi-organisasi Islam yang berbeda. Ledakan protes terhadap gagasan Gus Dur sebenarnya sudah bisa ditebak. Ketika pemerintah B.J. Habibie (Mei 1998 hingga Oktober 1999) membebaskan 10 tahanan politik "G30S" yang tersisa, banyak pemimpin terkemuka dari berbagai organisasi Muslim memiliki reaksi beragam. Di satu sisi, mereka setuju dengan alasan kemanusiaan pemerintah, bahwa pembebasan Tapol tua yang menderita berbagai penyakit mencerminkan sentimen kemanusiaan mereka. Namun, di sisi lain,

mereka masih berpandangan bahwa bagaimanapun juga, Tapol adalah komunis dan komunis adalah pengkhianat bangsa, negara. Inilah sebabnya mengapa mereka selalu merasa perlu untuk mengingatkan publik tentang "potensi (potensi) bahaya komunisme", sebuah retorika yang sering direproduksi oleh rezim Orde Baru.

Kalangan NU telah menyaksikan kejatuhan, kehancuran serta berakhirnya PKI dengan organisasi-organisasi bawahannya, akibat salah langkah politiknya dalam kudeta 30 September 1965. Disusul dengan penangkapan DN Aidit di Surakarta pada 22 November 1965. Dengan ini Peristiwa itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbebas dari kebiadaban pemimpin PKI. Kalangan NU juga menyaksikan kekalahan dan keruntuhan partai politik anti agama: pertama, kudeta PKI di Cirebon yang dipimpin Mohammad Joesoep pada 1 Februari 1946. Kedua, kudeta pada 3 Juli 1946 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Tan. Malaka. Ketiga, kudeta PKI di Madiun pada 19 September 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Moeso. Keempat, upaya komunis nasional atau internasional dengan kudetanya gagal. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghidupkan ideologi Marxis yang mengajarkan anti agama dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Persepsi Gus Dur tentang sektarianisme dan kepeduliannya terhadap keterlibatan NU dalam pembantaian 1965-66; Pertama, soal toleransi, ini sangat penting. Sedangkan yang terakhir adalah salah satu konsekuensi logis yang berbeda dalam arti bahwa NU seharusnya tidak hanya melindungi etnis dan agama minoritas sebagai "kelompok rentan". NU juga harus mengikutsertakan mereka yang mendapat stigma sosial dan politik sejak berdirinya rezim Orde Baru, yaitu para eks-Tapol dan penyintas pembantaian 1965-66. Muncul gagasan NU yang damai. Gagasan ini seringkali melibatkan upaya untuk melihat tindakan bersama untuk membahas berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, dan kemudian merenungkan langkah-langkah praktis yang perlu diambil untuk kebaikan bersama suatu negara.

Masyarakat memprakarsai rekonsiliasi antara NU dan para penyintas pembunuhan 1965-1966 (Khikmawati, 2019). Ada dua hal yang luar biasa tentang pengakuan ini. Pertama, pengakuan NU atas keikutsertaan NU dalam pembantaian 1965-1966 merupakan noda atau noda. Pengakuan ini pecah dengan "mitos korban dan kepolosan" yang terus merajalela di Indonesia pasca-Soeharto, terutama di kalangan umat Islam. Mitos ini merupakan hambatan besar untuk menghadapi kebenaran yang tidak diinginkan, karena orang, secara individu atau kolektif, ingin melihat diri mereka sendiri sebagai korban yang tidak bersalah, bahkan ketika mereka terlibat, tentang kekejaman masa lalu. Kedua, pengakuan bahwa kaum Komunis adalah penduduk desa biasa, tetangga orang-orang NU sendiri, dan bahwa mereka juga Muslim. Itu adalah tantangan yang kuat terhadap sikap "komunis" terhadap neraka, seperti yang selalu didengar orang dalam retorika anti-komunis. Kelompok ini menggambarkan "komunis" sebagai orang-orang dengan wajah dan nama, yang beragama Islam dan yang mengenal NU sendiri. Persepsi baru tentang masa lalu dan viktimisasi NU sedikit banyak membentuk kebiasaan Syarikat. Rekonsiliasi sebagai sarana untuk mengakhiri hubungan traumatis antara NU dan mantan komunis, sebagai korban utama kekejaman masa lalu. Mengakhiri luka adalah cara untuk menyembuhkan luka dan menghilangkan permusuhan dan kecurigaan tentang rasa jijik masa lalu. Mereka berharap persaudaraan bisa muncul dari rekonsiliasi.

Dalam mediasi sosial, perselisihan antara NU dan PKI merupakan konflik sosial horizontal. Konfrontasi antara dua kekuatan sosial yang berbeda keyakinan dan ideologi yang berlawanan. Namun pada dasarnya mereka dulu hidup bertetangga, untuk itu terjadi proses rekonsiliasi yang wajar di antara mereka, sesuai dengan tradisi dan norma sosial yang berlaku. Bahkan sebagai tanggung jawab sosial, para korban PKI seperti janda dan anak yatim, termasuk mereka yang salah tangkap, didukung oleh komunitas NU dimanapun mereka berada. Fase rekonsiliasi ini sudah berlangsung sejak kasus Madiun. Berbagai upaya dilakukan ormas NU untuk mendukung keluarga

ExPKI bahkan PKI yang telah mendeklarasikan kembali ke ajaran Islam. Dengan kesadaran ini, mereka bersimpati kepada NU yang sejak awal melindungi dan melayani mereka dalam keadaan krisis eksistensial dan ancaman serta represi yang parah. Selama ini mereka menderita trauma yang berlangsung sejak awal pembersihan sisa-sisa PKI. Mereka membutuhkan perlindungan dan rasa aman karena mereka hanyalah keluarga dan anak-anaknya. Mereka tidak berpartisipasi dalam provokasi atau pemberontakan. Karena konflik antara NU dan PKI pada hakikatnya adalah konflik sosial, maka rekonsiliasi sosial akan lebih mudah dicapai, bahkan dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Polanya berjalan lancar dan baik, sehingga reintegrasi bisa terjadi lagi setelah konflik berkepanjangan yang memakan banyak korban jiwa.

Proses rekonsiliasi didorong oleh fakta-fakta yang tidak dapat digeneralisasikan selama diajarkan dalam buku-buku sejarah resmi. Penyebabnya terbagi dalam tiga kategori: persaingan untuk fasilitas, pengaruh negara adidaya, dan konflik nilai atau ideologi. Di jantung PKI Boyolali, khususnya di daerah Ngemplak, dikatakan bahwa aksi sepihak itu menimbulkan respon yang berbeda di subbagian yang berbeda. Begitu pula dengan sikap para tokoh Kyai dan NU terhadap Komunis saat ini. Perbedaan sikap ini sebagian menjelaskan kontradiksi antara kedua belah pihak, yaitu; Apa perbedaan antara orientasi fiqh dan tasawuf. Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa kyai yang lebih Fiqhist dan terlibat dalam kegiatan politik selama ini cenderung menunjukkan sikap yang kuat terhadap PKI, sedangkan kyai yang lebih Fiqhist dan terlibat dalam kegiatan politik tasawuf dan menyukai budaya lokal cenderung menjadi pelindung (Fealy & McGregor, 2010). Di Boyolali sendiri, relatif banyak kyai yang berorientasi sufi dan menghargai budaya lokal, karena ketika PKI diburu dalam peristiwa tersebut, mereka cenderung menjadi pelindung agar PKI tidak dipenjara.

Pihak-pihak yang berkonflik juga berbeda-beda di setiap kecamatan. Konflik PKI yang terjadi mengarah ke NU dalam

peristiwa tersebut, namun peristiwa tersebut relatif aman karena tidak mengarah pada pembunuhan yang hanya dilakukan di dalam penjara. Dan GP Ansor terlibat dalam penangkapan orang-orang dari PKI, yang mengakibatkan mereka kemudian mendapat hukuman. Meskipun kemudian dilihat sebagai kelompok yang digunakan oleh militer sebagai alat. Kegiatan rekonsiliasi antar NU-PKI di Boyolali dalam kegiatan sosial berhasil menyatukan kedua kelompok dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Relatif banyak eks PKI atau terduga PKI yang kembali berislam mengikuti ajaran NU, sehingga banyak pionir NU adalah eks PKI. Dan banyak masjid dan mushola dibangun karena semakin banyak orang dari PKI masuk Islam. Karena pimpinan PKI Boyolali Power Center yang terpilih sebelumnya adalah orang-orang dari PKI dan orang-orang ini ditangkap, dihilangkan atau dideportasi, maka lurah penerusnya adalah seseorang dari NU yang melindungi semua orang PKI saat itu. Seperti diketahui orang-orang yang dianggap PKI sulit untuk diajak berinteraksi, sehingga masyarakat NU menyambut baik mereka untuk berinteraksi satu sama lain, terutama dalam kegiatan sosial keagamaan dan dukungan untuk pembangunan desa. Saat ini rekonsiliasi ini sudah mulai nampak secara kultural, walaupun secara struktural dan politis konflik yang terjadi belum dapat sepenuhnya disembuhkan, namun ada keinginan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan membangun semangat perdamaian sekaligus secara politik dan sosial antara orang-orang yang tinggal di sana terjadi secara mandiri.

MENGAGAS POLITIK PERDAMAIAN MELALUI RANAH PENDIDIKAN

Ranah pendidikan dianggap sebagai medium paling ideal dalam memberikan pemahaman pada generasi baru tentang makna identitas sosial dan nasionalisme yang tidak tercipta dari konflik. Ranah pendidikan juga dianggap memiliki kelebihan berupa fleksibilitas proses diskusi pengetahuan yang tidak dimiliki oleh proses sosial di masyarakat yang cenderung “mengikuti arus”,

untuk itu upaya untuk menciptakan strategi politik perdamaian di ranah pendidikan memiliki dorongan yang cukup kuat dari beragam elemen di masyarakat Boyolali.

Guru dalam menentukan strategi pembelajaran memulai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Identifikasi tujuan tersebut sangat penting dan terkait dengan langkah selanjutnya dalam menentukan pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan, sebelum guru memilih atau menentukan strategi mana yang akan digunakan, diterapkan atau digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah untuk menentukan strategi yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama, menentukan karakteristik materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, guru perlu mengetahui karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Dengan ilustrasi, dokumen tentang "Tragedi 1965". Hal ini merupakan fakta yang kontroversial, menunjukkan adanya anomali dalam peristiwa-peristiwa yang bertentangan dan berbeda dengan sejarah yang diturunkan (pada masa Orde Baru). Dalam hal ini, siswa tentu saja harus dilatih untuk mengkritik peristiwa-peristiwa ini dengan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber sejarah yang ada (baik itu buku atau dokumenter). Dari uraian di atas, tampak bahwa ciri-ciri dokumen "Tragedi 1965" adalah hal-hal yang harus ditelaah dan dianalisis secara serius untuk memperoleh pemahaman atas fakta yang ada. (Nugroho, 2019). Siswa dalam hal ini menjadi objek berpikir analitis dan kritis dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, seolah-olah siswa adalah pusat pembelajaran. Mengapa demikian karena siswa membuat aktivitas dengan saran dari guru sebagai fasilitator.

Kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Melalui karakteristik bahan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terbentuk. Karakteristik bahan ajar sangat membantu dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Melalui karakteristik tersebut, kita akan menemukan unsur-unsur yang menjadi dasar dari tujuan pembelajaran. Mengingat ciri-ciri

dokumen “Tragedi 1965” sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk membangun sikap kritis siswa dalam memahami peristiwa tahun 1965, dengan melakukan pemeriksaan dan membandingkan sumber yang berbeda dari fakta-fakta ini untuk kemudian menarik interpretasi. Untuk melihat atau mempermudah bimbingan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang sebenarnya dapat dilihat dengan memperhatikan kompetensi inti dan indikator mata pelajaran. Berawal dari dokumen ini, 9 siswa dilatih untuk berpikir sistematis, logis dan kritis untuk memahami dan menganalisisnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada siswa atau student oriented, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator.

Ketiga, menentukan metode pembelajaran. Memilih metode pembelajaran merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan strategi mana yang akan diterapkan. Guru harus berhati-hati dalam menentukan apakah akan mengadopsi pendekatan yang berpusat pada guru atau pendekatan yang berpusat pada siswa. Kemudian pertanyaan yang muncul di benak adalah, kapan harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru dan kapan harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Penerapan pendekatan teacher-centered diterapkan ketika berorientasi pada pengembangan kapasitas siswa. Dalam hal mengembangkan segala potensi yang ada pada siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan membangun berpikir logis dan sistematis, menyusun hipotesis dan membuktikan hipotesis.

Keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode adalah sarana untuk mengimplementasikan strategi. Metode pembelajaran yang digunakan sepenuhnya terserah pada guru. Hal ini ditentukan berdasarkan sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, penunjang pembelajaran, bahan ajar, waktu yang tersedia, kondisi kelas dan lingkungan. Dalam hal ini, metode yang diterapkan pada sekolah-sekolah di perkotaan digambarkan dengan jumlah siswa yang ideal (30 siswa per kelas) dengan

prestasi akademik rata-rata atau lebih tinggi. Fasilitas pendukungnya cukup lengkap, mulai dari sumber perpustakaan hingga internet. Mengapa hal ini dibatasi pada kondisi ideal sempurna karena waktu yang terbatas untuk memberikan contoh dengan kondisi yang berbeda, selain itu juga untuk mendorong setiap sekolah untuk dapat mencapai tujuan yang sama kondisi ideal ini. Berdasarkan kondisi di atas maka metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, video review dan pembelajaran online.

Kelima, menentukan teknik pembelajaran. Secara teknis kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan secara singkat peristiwa tahun 1965, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi, essay, guru mengajukan beberapa pertanyaan. yang dapat merangsang siswa untuk menemukan masalah dalam materi yang akan dipelajarinya; dan guru menunjukkan film dokumenter bagi siswa untuk dikritik melalui video kritis.

Keenam, tentukan kriteria dan ukuran keberhasilan. Kriteria keberhasilan proses pembelajaran ini yang menjadi tolak ukur untuk melihat dan menentukan keberhasilan proses pembelajaran "Tragedi 1965" adalah kemampuan peserta didik untuk menemukan masalah dan merumuskan hipotesis yang lahir. Dengan kata lain, menemukan anomali dalam peristiwa 1965 membantu menjawab hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam literatur yang dipelajari. Kesimpulan yang diharapkan dari informasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran, guru berperan dalam mencegah pembelajaran yang mengarah pada refleksi konstruktif dan kritis tentang perdamaian dan kerukunan sosial, daripada menghasut balas dendam, sehingga pasifisme akan bermain dalam skenario guru. dan siswa sebagai pembelajar, yang terus didorong untuk memahami sejarah dalam kerangka humanisme.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan bahwa politik perdamaian merupakan satu alternatif yang harus ditempuh untuk mengembalikan tatanan sosial yang harmonis di Boyolali. Selama ini masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam prasangka dan dendam. Politik perdamaian di ranah pendidikan membuka peluang bagi lahirnya generasi baru yang terlepas dari konflik masa lalu, merekat kembali keharmonisan, dan merekonstruksi nasionalisme dan identitas sosial yang lebih kuat. Saat ini kondisi yang ada hanya baru memungkinkan jika pendidikan dapat memanfaatkan media dan sumber belajar alternatif. Model politik perdamaian yang digagas adalah pemanfaatan media kreatif dan penerapan pembelajaran dialogis untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif sehingga diharapkan timbul pengetahuan dan pemahaman siswa yang humanis. Hal itu menjadi catatan penting bagi gagasan model politik perdamaian yang ada, untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Boyolali saat ini dan di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang telah mendanai penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T., 1994. History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesian Archipelago. *Studia Islamika*, 1(3).
- Abdullah, T., Abdurrachman, S., & Gunawan, R., 2012. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal* (Vol. 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adam, A. W., 2018. Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, (95), pp.11–30.
- Adam, A. W., & Anwar, D. F., 2005. *Violent Internal Conflicts In Asia Pacific: Histories, Political Economies, and Policies*. Yayasan Obor Indonesia.

- Anderson, B., 2006. *Imagined Communities*. Routledge.
- Anderson, B., & McVey, R. T., 2009. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Anderson, B. R. O., 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. SEAP Publications.
- Boden, R., 2008. The 'Gestapu' events of 1965 in Indonesia: New evidence from Russian and German archives. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 163(4), pp.507–528.
- Fauziyyah, I., 2015. *Konflik Pemuda Anshor dengan PKI di Boyolali pada Periode Tahun 1955-1968*.
- Fealy, G., & McGregor, K., 2010. Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance. *Indonesia*, (89), pp.37–60.
- Hatley, B., 2008. *Javanese Performances on an Indonesian Stage: Celebrating Culture, Embracing Change*. NUS Press.
- Herlambang, W., 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru melegitimasi Anti-komunisme Melalui Sastra dan Film*. Marjin Kiri.
- Imroaturosidad, I., 2015. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Desa (Studi Kasus di Dukuh Pulutan Desa Pulutatr Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)*. *PhD Thesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Khikmawati, W., 2019. *Rekonsiliasi Kultural Eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 1965-2006 di Temanggung*. *PhD Thesis*. IAIN SALATIGA.
- Kurniawan, G. F., Warty, W., & Sutimin, L. A., 2019. Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), pp.36–52.
- Lim, M., 2017. Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), pp.411–427.
- Luhulima, J., 2006. *Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain*. Penerbit Buku Kompas.
- Luo, X., Zhang, J., & Duan, W., 2013. Social Media and Firm Equity Value. *Information Systems Research*, 24(1), pp.146–163.
- Mandela, N., 2008. *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*. Hachette UK.

- McGregor, K., 2013. Mass Violence in the Indonesian Transition from Sukarno to Suharto. *Global Dialogue (Online)*, 15(1),pp.134.
- Nora, P., 1989. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations*, 26, pp.7–24.
- Notosusanto, N., & Saleh, I., 1989. *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*. Intermedia.
- Nugroho, F., 2019. Penggunaan Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial. *Nosarara: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(2).
- Pertiwi, A., 2018. Konflik Peran Ganda Buruh Perempuan PT. Sarana Cipta Busana Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 8(1).
- Putra, A. A. G., 2012. *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*. ELSAM.
- Roosa, J., 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Nobodycorp.
- Said, S., 2013. *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian*. Mizan Pustaka.
- Said, S., 2018. *Gestapu 65*. Mizan Publishing.
- Sanit, A., 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Pustaka Pelajar.
- Suwirta, A., 2000. Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: "Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan". *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), pp.43-49.